

Kamis 24 Februari 2011

## Kejati Kalbar Tunggu Laporan Temuan BPK

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar telah merilis ribuan temuan dalam proses penggunaan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar. Lembaga auditor akan menindaklanjuti temuan itu ke aparat penegak hukum.

"Kalau memang BPK memberikannya ke kita, kita siap memproses," tegas Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi



Dokumen/Equator  
Arifin Arsyad

Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Kalbar kepada Equator, Rabu siang (23/2).

Menurut Arifin, semua laporan wajib ditindaklanjuti. Bukan saja dari BPK. "Kalau masyarakat yang laporkan, kita juga akan proses," tutur Arifin.

■ Halaman 7

## Kejati Kalbar

..... dari halaman 1

Namun proses itu, kata dia diteliti terlebih dahulu secara detail kebenaran laporan yang disampaikan.

Dalam hal penanganan perkara, jelas Arifin, ada tahapan mulai penyelidikan, penyidikan, hingga tahap penuntutan di pengadilan. "Akan kita lihat bukti dan fakta-fakta dari laporan tersebut. Kalau memang benar, akan ditindaklanjuti hingga pengadilan," tukas Arifin.

Seperti diberitakan Equator, BPK Perwakilan Kalbar mencatat selama 2004 hingga semester II 2010 terdapat 2144 temuan dalam proses penggunaan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar. Terhadap

temuan itu, BPK membuat dan 4313 rekomendasi.

Dari total rekomendasi BPK itu, 15 entitas (sasaran audit) di Kalbar yang mencakup 14 kabupaten/kota dan Pemprov baru menindaklanjuti sekitar 50 persen rekomendasi. Sisanya ada yang masih dalam proses tindak lanjut, dan ada juga yang belum ditindaklanjuti sama sekali.

Dari 14 kabupaten/kota plus pemerintah provinsi, BPK mencatat hanya tiga pemerintah daerah yang patuh dan menempati urutan teratas melaksanakan tindak lanjut. Mereka adalah Pemkab Sambas dengan ranking 83%, Pemkab Landak 74% dan Pemkot Singkawang 73%. Yang terendah Kabupaten Melawi. (bdu)